

KAJIAN BAHASA-BAHASA DAERAH YANG HAMPIR PUNAH



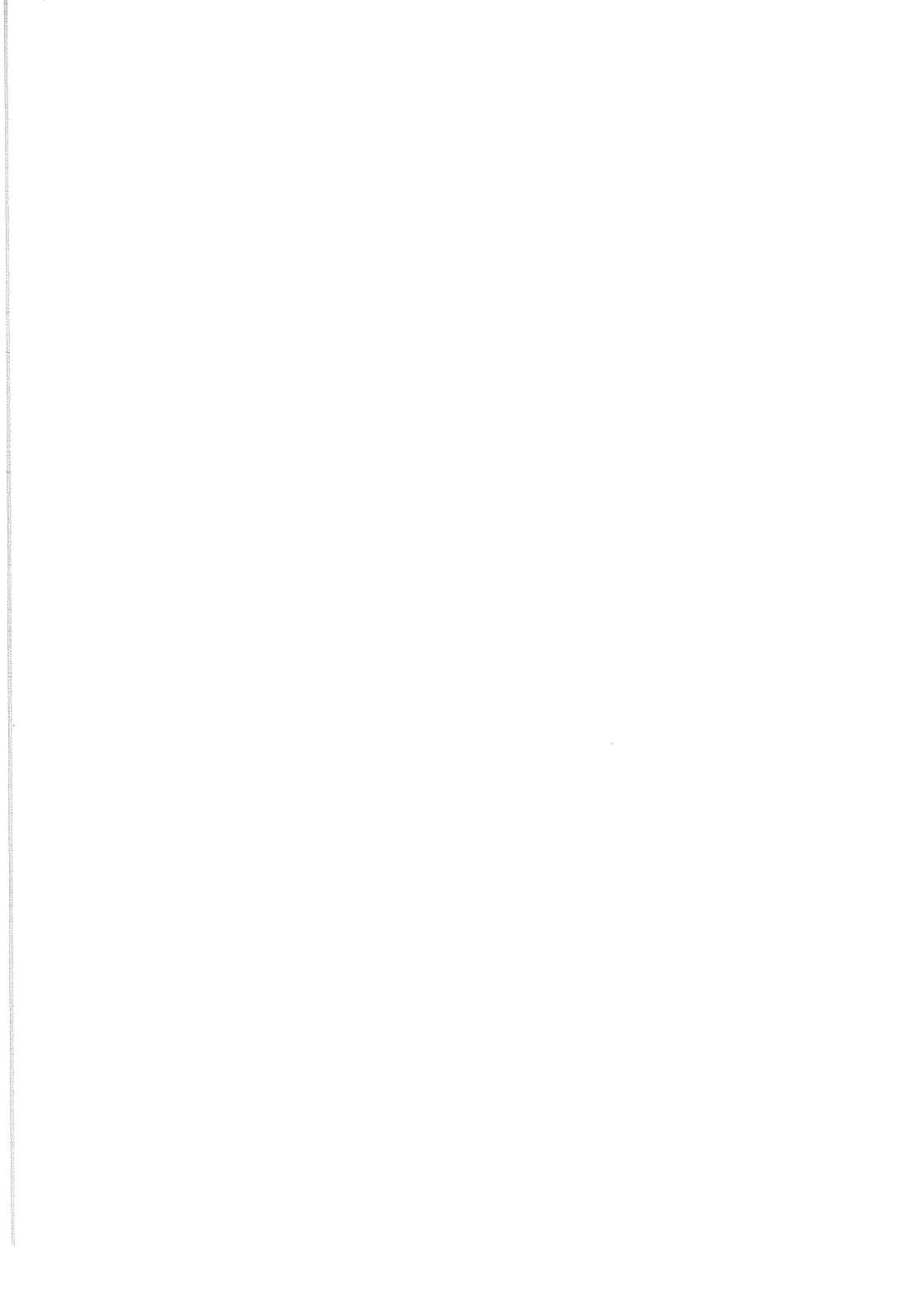
REPRESENTASI BAHASA DALAM OTONOMI DAERAH

Oleh :

Ninuk Kleden - Probonegoro



Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jakarta, 2003



KATA PENGANTAR

Proyek Kajian Bahasa-bahasa Daerah yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI) merupakan salah satu program riset kompetitif dan diseminasi LIPI yang baru dilakukan pada tahun 2003.

Terdapat dua kegiatan proyek ini, yaitu: *Pertama*, pelatihan linguistik untuk peneliti muda dari berbagai disiplin ilmu sosial dan kemanusiaan yang berminat pada linguistik, dan *Kedua*, melakukan studi terhadap bahasa-bahasa daerah yang hampir punah.

Laporan ini adalah penelitian pertama dari seluruh kegiatan proyek yang telah dilakukan oleh Dr. Ninuk Kleden-Probonegoro tentang Bahasa Banjar Hulu khususnya sub-dialek Paringin di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara teoritik laporan ini memperlakukan bahasa dan religi sebagai suatu representasi identitas, yang berarti bahasa tampaknya bersifat homogen dalam masyarakat yang heterogen, sedangkan religi lebih menunjukkan identitas etnik. Kedua bentuk identitas tersebut berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten Balangan. Dengan demikian ada dua aspek penting yang berhubungan dengan proses terjadinya representasi, yaitu adanya aktor pelaku dan konteks. Dalam hal ini konteks adalah situasi sejarah dan ruang geografis di mana identitas itu diperankan oleh aktor pelaku. Ia akan melibatkan persoalan subyektivitas dan kesadaran, serta bentuk dan cara representasi subyektivitas itu dijalankan. Dengan demikian, identitas bukanlah sebuah konsep dan kenyataan yang tak berubah karena pada dasarnya aktor pelaku selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam proses ini

seorang individu mendapat kesempatan untuk bertemu dan melakukan kontak dengan kebudayaan lain. Perpindahan ruang dapat menciptakan ruang-ruang wacana baru tentang identitas di mana terjadi interaksi antara individu-individu yang “tercabut” dari asal mereka, tetapi masih memiliki kesamaan referensi identitas etnik.

Penelitian ini baru menyelesaikan permasalahan yang ada dalam satuan etnik (*ethnic boundary*) saja, dan belum sampai pada persoalan-persoalan yang menyangkut satuan linguistik (*linguistic boundary*). Padahal telah direncanakan kedua aspek tersebut dijadikan sebagai obyek penelitian.

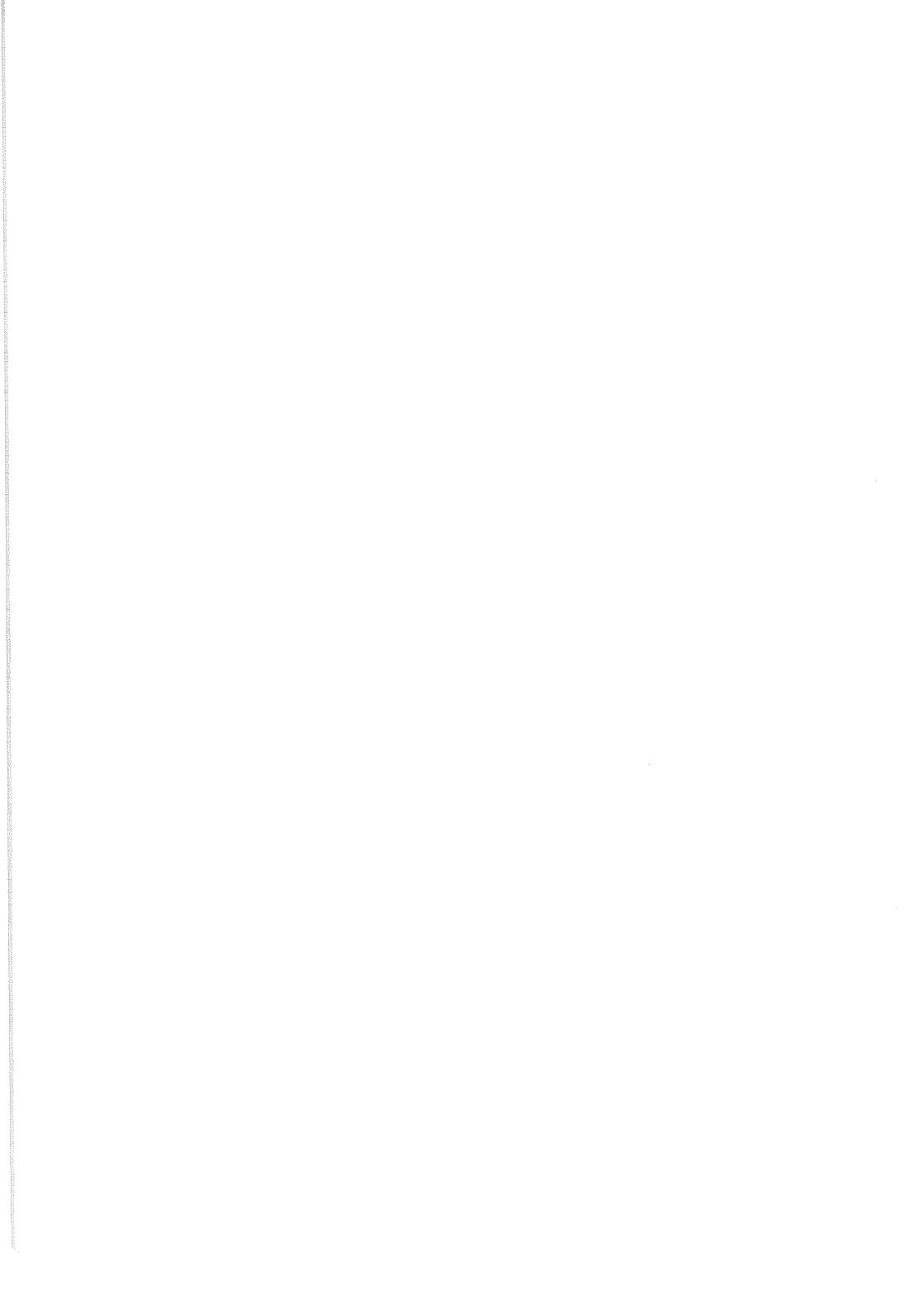
Dengan berakhirnya waktu, berakhir pulalah penelitian yang belum sempurna ini. Meskipun demikian sepatutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kami dapat menikmati berbagai kemudahan baik di Jakarta maupun di daerah penelitian.

Sebagai penelitian awal dengan segala kendalanya, tentu saja penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik demi kesempurnaan laporan ini kami tunggu.

Jakarta, 29 Desember 2003

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

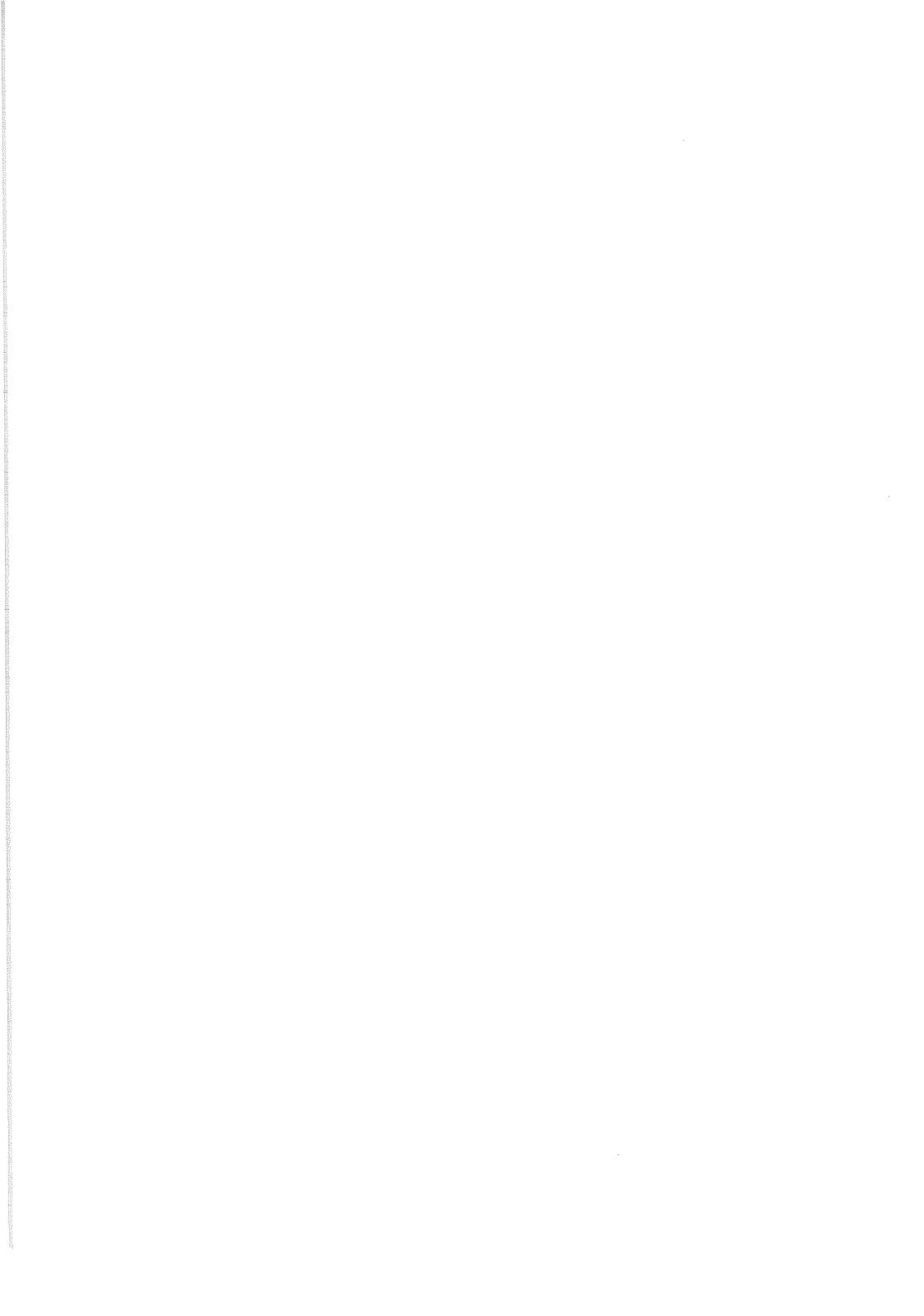
Dr. Muh. Hisyam
NIP. 320002816



DAFTAR ISI

1. Bahasa Dan Otonomi Daerah; Suatu Permasalahan	1
2. Kerangka Pemikiran & Operasionalisasi Masalah	4
3. Metode, Daerah dan Obyek Penelitian	5
4. Hetrogenitas Etnik & Homogenitas Bahasa	11
5. Hetrogenitas Etnik & Homogenitas Bahasa	13
5.1. Hetrogenitas Etnik	13
5.2. Homogenitas Bahasa	16
5.3. Nan Sarunai; Hetrogenitas Etnik & Homogenitas Bahasa dalam Tradisi Lisan	25
6. Religi; Representasi Identitas	26
6.1. Islam dalam Sejarah Identitas	27
6.2. Sistem Kepercayaan di Paringin	33
6.3. Islam dan Identitas Etnik	40
6.4. Etnik dan Representasi Melalui Bahasa	45
7. Penutup	47

KEPUSTAKAAN



REPRESENTASI BAHASA DALAM OTONOMI DAERAH

1. Bahasa dan Otonomi Daerah; Suatu Permasalahan

Menurut suatu perhitungan yang dilakukan oleh Barbara F. Grimes, di Indonesia terdapat 706 bahasa yang lebih dari separuhnya ada di Irian Jaya (Bambang Kaswanti Purwo, 2002: 16). Apabila bahasa daerah dapat dijadikan tolok ukur minimal suatu identitas etnik, maka keragaman bahasa menandai adanya masyarakat dan kebudayaan yang pluralistik¹, karena bahasa dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa adalah ekspresi nilai, norma, aturan, adat dan kebiasaan suatu kebudayaan, bahkan sangat mungkin bahwa bahasa dapat merupakan ekspresi dari representasi politik termasuk politik kebudayaan.

Penelitian hubungan antara bahasa dengan politik di Indonesia misalnya seperti penelitian yang dilakukan R.O.G. Ben Anderson, *Languange and Power; Exploring Political Culture in Indonesia* (1990). Penelitian tentang Kebijakan Bahasa pada masa Orde Baru (2001) yang dilakukan oleh Benny H. Hoed dan kawan-kawan, mempersoalkan bahasa sebagai alat kekuasaan.

¹ Konsep Pluralisme Budaya diambil dari Hutchinson & Smith, 1996

Bahasa Indonesia sejak awalnya memang mempunyai posisi politis yang sangat kuat dan strategis. Hal itu tampak dari digunakannya bahasa Indonesia diberbagai bidang, seperti politik, pendidikan, media, ekonomi dan bahkan perundang-undangan. Kedudukan bahasa Indonesia yang kuat dan strategis itu berlangsung terus sampai pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Sejalan dengan kebijakan kebudayaan pada masa Orde Baru, kebijakan bahasa pun sangat sistematis dan intensif, dimulai dari pusat maupun daerah. Dalam kondisi seperti ini mulai tampak hegemoni bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah.

Pada masa reformasi ini, di mana pluralitas mulai ditegakkan dan keberagaman etnik mulai diakui, bukannya tidak membawa permasalahan politis. Timbul persoalan-persoalan praktis yang menyangkut hubungan antar kabupaten, hubungan antara kabupaten dengan provinsi yang melahirkan provinsi atau kabupaten-kabupaten baru. Tidak kurang pentingnya adalah masalah bahasa, yang dapat dijadikan tolok ukur identitas suatu kelompok etnik yang sebenarnya juga mengimplisitkan simbol identitas daerah. Provinsi baru yang lahir dengan membawa nama bahasa, misalnya provinsi Banten yang bahasa Sundanya berbeda dengan bahasa Sunda yang digunakan oleh orang Bandung dan Cirebon. Saat ini penutur dialek Cirebon juga sedang berjuang untuk bisa menjadi provinsi yang lepas dari provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini tampaknya persoalan hubungan antara bahasa dengan provinsi atau kabupaten itu timbul karena di dalam satu wilayah provinsi atau kabupaten ada beberapa bahasa besar.

Di Kalimantan Selatan ada dua kabupaten baru yang masyarakat penuturnya adalah pengguna sub-dialek bahasa Banjar, kabupaten Tanah Bumbu yang masyarakatnya adalah penutur dialek Banjar (kuala)- Bugis, dan provinsi Balangan yang masyarakatnya adalah penutur bahasa Banjar, sub-dialek Paringin. Dengan demikian, bahasa daerah yang seharusnya berperan sebagai simbol identitas daerah, justru merupakan sumber perpecahan berdasarkan afiliasi bahasa dan suku bangsa (baca: etnik).

Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kelompok etnik Banjar yang menggunakan bahasa Banjar. Salah satu dialek bahasa Banjar adalah Banjar Hulu yang melibatkan kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan kabupaten Tabalong. Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami pemekaran, enam kecamatan yang masyarakatnya menuturkan sub-dialek Paringin, bergabung dan berdirilah kabupaten Balangan.

Gejala berdirinya kabupaten Balangan memperlihatkan adanya hubungan antara bahasa dengan Otonomi Daerah yang memunculkan dua masalah. Masalah pertama menyangkut konstruksi kesatuan politik melalui bahasa (*linguistic construction of political unity*) dan masalah kedua berhubungan dengan konstruksi komunitas bahasa melalui politik (*political construction of linguistic community*). Dalam masalah pertama, penutur suatu bahasa yang sama cenderung menjadi anggota suatu kesatuan politik yang sama. Pertanyaannya mengapa penutur suatu bahasa yang sama ingin mempunyai suatu

komunitas politik yang sama? Jawabannya secara hipotetis ialah agar ada perlindungan politik terhadap bahasa mereka.

Pada masalah kedua, kebijakan atau keputusan politik (baca: Otonomi Daerah) dapat mendorong terbentuknya komunitas dari orang-orang yang menuturkan bahasa yang sama. Selanjutnya, mengapa suatu keputusan politik dapat mempersatukan penutur bahasa ke dalam suatu komunitas yang sama? Jawabannya secara hipotetis ialah karena komunitas bahasa tersebut merupakan representasi dari terlaksananya suatu keputusan politik.

2. Kerangka Pemikiran & Operasionalisasi Masalah

Ada dua konsep pokok yang perlu dioperasionalkan yaitu konstruksi politik dan konstruksi linguistik. Kalau kedua konsep tersebut diletakkan dalam posisi dikotomi, maka konsep pertama berhubungan dengan tindakan yang bersumber dari pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar komunitas penutur bahasa yang ada di kabupaten Balangan, sedangkan konsep konstruksi linguistik bersumber dari pemikiran masyarakat komunitas bahasa yang bersangkutan. Konstruksi linguistik itu merupakan kesadaran yang dipengaruhi oleh sejarah dan tradisi, sedangkan konstruksi politik bukan merupakan ciptaan sejarah dan tradisi komunitas penutur sub-dialek Paringin.

Karena itu, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan; politik (baca: *political boundary*), bahasa (baca: *linguistic boundary*), dan kelompok etnik (baca: *ethnic boundary*). Tumpang tindih terjadi, karena di dalam batas administrasi pemerintahan, yaitu

geo-politik, masyarakat dapat terdiri atas komunitas etno-linguistik yang berbeda, dan menggunakan bahasa yang berbeda. Dalam batas politik itu, dapat pula terjadi kelompok-kelompok etnik yang berbeda itu menuturkan bahasa yang sama. Kemungkinan lain bahwa batas politik yang berbeda dihuni oleh komunitas-etnolinguistik yang sama, meskipun tidak meninggalkan kemungkinan bahwa bahasa yang dituturkan juga berbeda.

Kalau dalam konsep *linguistic boundary* dan *ethnic boundary*, mengandaikan bahwa penutur bahasa tidak memerlukan belajar untuk dapat menguasai bahasa yang digunakan dalam wilayah politiknya, maka kelompok migran misalnya, harus belajar untuk dapat menguasai bahasa yang dominan di wilayah yang dihuninya. Dengan kata lain, harus pula diperhatikan kelompok etnik yang menggunakan bahasa yang bukan bahasa etniknya.

Dalam mengoperasionalkan permasalahan yang disebutkan di atas, yang dilakukan pertama-tama adalah mendeskripsikan identifikasi kelompok etnik yang ada di daerah penelitian, mengidentifikasi bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok etnik yang bersangkutan, dan memperhatikan apakah ada satu bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok etnik yang berbeda.

3. Metode, Daerah dan Obyek Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, karena deskripsi yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah administrasi politik,

kelompok etnik beserta bahasanya, semua masih bersifat pengenalan. Termasuk mencari daerah yang layak digunakan sebagai daerah penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diajukan, mencari informan kunci, teman dan kondisi lapangan, melihat perilaku politik dan kebiasaan masyarakat yang dijadikan obyek penelitian, yang semuanya sangat memerlukan waktu.

Teknik penelitian yang digunakan untuk tujuan mengidentifikasi *political boundary* dan *ethnic boundary* ini adalah wawancara dan observasi biasa. Adapun daerah penelitian ditentukan dengan tahapan-tahapan. Tahap pertama adalah mencari data-data statistik dan demografi di Amuntai, ibu kota kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal itu dilakukan karena kabupaten Balangan berinduk pada kabupaten HSU yang setelah adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, melepaskan diri dari kabupaten induknya. Tabel di bawah ini memperlihatkan persebaran penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum terjadinya pemekaran

Tabel : 1
 Penduduk Menurut Wilayah Administrasi dan Suku Bangsa
 Kabupaten Hulu Sungai Utara
 Kalimantan Selatan Tahun 2000

	S u k u B a n g s a							Jumlah
	Banjar	Jawa	Bugis	Madura	Bkp*	Sunda	Lainnya	
Danau Panggang	25,520	47	2	0	13	3	69	25,654
Babirik	17,158	21	0	0	0	2	29	17,210
Sungai Pandan	37,938	65	8	12	1	53	60	38,137
Amuntai Selatan	24,007	45	2	0	0	5	29	24,088
Amuntai Tengah	40,853	1,081	34	64	17	52	214	42,315
Banjang	14,836	153	6	60	4	6	16	15,081
Amuntai Utara	33,416	129	9	9	0	8	129	33,700
Lampihong	14,473	68	17	6	0	1	3	14,568
Batu Mandi	13,372	126	30	1	0	9	37	13,575
Awayan	14,436	120	12	6	3	9	1,238	15,828
Paringin	19,615	898	28	20	2	103	271	20,937
Juai	12,050	1,555	7	14	0	38	65	13,730
Halong	10,055	1,596	17	4	2	6	5,486	17,166
Jumlah	277,729	5,904	172	196	42	295	7,647	291,989

Sumber: BPS. Kabupaten HSU. Hasil Sensus Penduduk 2000

Keterangan: * Bakumpai

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Balangan, yang pada awalnya adalah enam kecamatan dari kabupaten Hulu Sungai Utara. Keenam kecamatan itu adalah Lampihong, Batu Mandi, Awayan, Paringin, Juai dan Halong, yang tetap dengan nama yang sama berada dalam satu kesatuan administrasi kabupaten Balangan.

Dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Balangan tampaknya kecamatan Paringin lah yang mempunyai penduduk terbanyak, dan hal itu dapat dimengerti karena Paringin adalah ibu kota kabupaten. Kecamatan ini didominasi oleh orang Banjar, meskipun orang Jawa cukup banyak yang tinggal di sana, tetapi ada juga orang Sunda, Bugis, Madura, Dayak, dan kami bertemu dengan orang Batak Mandailing yang bekerja sebagai guru di sekolah luar biasa. Berdasarkan alasan itu lah, maka kecamatan Paringin diambil sebagai daerah penelitian, pertama-tama untuk mendeskripsikan secara umum keadaan Kabupaten Balangan termasuk diversitas bahasanya.

Setelah kecamatan Paringin yang berpenduduk 20.937 jiwa itu ditetapkan, ditelusuri kembali desa yang akan dijadikan wilayah penelitian. Paringin sendiri terdiri dari tiga desa yang direncanakan untuk menjadi kelurahan karena penduduknya sudah mencapai 3.000 jiwa, syarat untuk berdirinya suatu kelurahan, yaitu Paringin Barat, Paringin Timur dan Paringin Kota. Ketiga desa ini lah yang sedang direncanakan untuk menjadi kelurahan Paringin.

Ketiga desa itu sangat heterogen dengan ciri masing-masing yang membentuk heterogenitas. *Paringin Kota*, mempunyai sifat heterogen karena di sana ada terminal yang menghubungkan Banjarmasin – Tanjung (di kabupaten Tabalong) dan singgah di Paringin. Selain itu rute yang lebih pendek seperti Amuntai – Tanjung, juga melalui Paringin, dan tentu saja kendaraan umum dengan jarak dekat, berangkat dari terminal di Paringin. Terminal yang merupakan gerbang kota Paringin dan kabupaten Balangan, dilengkapi dengan tiga buah losmen kecil tempat supir dan pedagang yang akan menginap di daerah ini. *Paringin Barat* yang letaknya berdampingan dengan Paringin Kota, mempunyai infra struktur pendukung bagi Paringin Kota, karena di sini banyak sekali rumah penduduk asli yang disewakan pada pedagang-pedagang pendatang yang mencari nafkahnya di kota ini. Selain juga tidak sedikit pegawai tambang batu bara yang tinggal berbaur dengan penduduk asli di sini. Akan halnya *Paringin Timur* heterogenitas etnik terutama terjadi karena di daerah ini ada Perumnas yang penghuninya kebanyakan adalah pendatang. Mereka bekerja sebagai pegawai negeri yang dipindahkan ke daerah ini, termasuk guru dan tidak sedikit pegawai PT. Adaro yang bergerak di bidang penambangan batu bara, memilih tinggal di Perumnas ini.

Pilihan daerah penelitian jatuh pada Paringin Timur, karena alasan teknis² semata-mata. Desa ini mempunyai 7 Rt. dan kelengkapan kartu KK. dan daftar anggota keluarga yang berhak memberikan suaranya pada Pemilu yang akan datang.

² Tidak berhasil mendapatkan kartu KK atau daftar anggota keluarga yang tinggal dalam wilayah Paringin Barat dan Kota Paringin.

Dari kartu KK yang ada, dipilih kepala keluarga dan istrinya serta ditanyakan kelompok etnik keduanya.

Uraian di atas telah menjelaskan cara menetapkan daerah penelitian, dan kini akan dijelaskan tentang bahasa yang dijadikan obyek dalam penelitian ini. Penelitian. Di Kalimantan Selatan yang mayoritas penduduknya adalah orang Banjar menuturkan bahasa Banjar. Ada dua kelompok penutur bahasa Banjar yang didasarkan pada perbedaan pada bunyi ucapan terhadap fonem tertentu. Di samping itu ada pula perbedaan lagu dan tekanan, selain juga ada perbedaan kosa kata di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, yang disebut dialek itu. Kedua dialek bahasa Banjar itu adalah dialek bahasa Banjar Kuala dan dialek bahasa Banjar Hulu (Abdul Djebar Hapip, 1997. Dialek bahasa Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk "asli" sekitar kota Banjarmasin, Martapura dan Pleihari, sedangkan dialek Banjar Hulu pada umumnya dituturkan di daerah Hulu Sungai. Yaitu di daerah kabupaten Tapin, kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, di kabupaten Tabalong dan di kabupaten Balangan yang beberapa saat lalu merupakan bagian dari kabupaten Hulu Sungai Utara.

Abdul Djebar Hapip (1997) mengatakan bahwa penutur dialek bahasa Banjar Hulu lebih luas daripada Banjar Kuala dan masih menunjukkan beberapa variasi sub-dialek, seperti Amuntai, Alabio, Kalua, Kandangan, Tanjung, dan seorang peneliti bahasa yaitu Den Hamer berpendapat bahwa bahasa yang digunakan oleh masyarakat pedalaman pegunungan Meratus adalah sub-dialek bahasa Banjar Hulu pula. Dengan

demikian, Abdul Djebar Hapip berpendapat bahwa mungkin masih banyak lagi variasi dialek bahasa Banjar Hulu ini. Salah satu variasi dialek yang belum dikemukakan oleh Abdul Djebar Hapip adalah sub-dialek Paringin yang sekarang sedang dijadikan obyek dalam penelitian ini.

4. Hetrogenitas Etnik & Homogenitas Bahasa

Deskripsi dalam laporan ini berangkat dari suatu pengandaian yang memperlakukan bahasa dan religi sebagai suatu representasi identitas. Ada dua masalah dari pengandaian tersebut, yaitu pertama, secara konseptual dapat dipertanyakan mengapa representasi identitas dan bukan identitas saja? Mengapa pula bahasa dan religi yang dianggap sebagai tanda budaya yang merujuk pada identitas. Padahal, masih banyak aspek-aspek kebudayaan lain yang rujukannya tidak dijadikan identitas atau representasi identitas.

Identitas dalam arti tradisional adalah ciri khas suatu kelompok etnik yang dapat membedakannya dari kelompok etnik lain. Dalam perkembangan teori kebudayaan yang banyak membicarakan identitas, post-strukturalisme dan Post-modernisme, melihat bentuk kebudayaan sebagai representasi identitas yang selalu terbuka oleh kemungkinan-kemungkinan pemaknaan. Penelitian ini melihat representasi baik sebagai hubungan antara penanda (*signified*) dengan tertanda (*signifier*), maupun sebagai pertentangan makna tanda budaya. Representasi dalam arti pertama maupun kedua, sama-sama melihat identitas sebagai suatu proses. Patut diketahui bahwa setidak-tidaknya ada dua aspek penting yang berhubungan

dengan proses terjadinya representasi, yaitu adanya aktor pelaku dan konteks. Dalam hal ini konteks adalah situasi sejarah dan ruang geografis di mana identitas itu diperankan oleh aktor pelaku. Ia akan melibatkan persoalan subyektivitas dan kesadaran, serta bentuk dan cara representasi subyektivitas itu dijalankan.

Kesadaran akan identitas pelaku itu terbentuk karena adanya wacana antara “aku” (*self*) dengan “liyan” (*the other*), yang dibentuk pada saat “aku” menginternalisasi katagori identitas melalui percakapan, dengan kontemplasi terhadap “yang liyan” (*the other*). Kalau pelaku yang aktor sosial berada dalam konteksnya, maka representasi (yang merupakan hubungan tanda dengan petanda, dan pertentangan makna) itu dapat pula ditafsirkan sebagai makna suatu identitas.

Dengan demikian, identitas bukanlah sebuah konsep dan kenyataan yang tak pernah berubah karena pada dasarnya aktor pelaku selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam proses ini seorang individu mendapat kesempatan untuk bertemu dan melakukan kontak dengan kebudayaan lain. Perpindahan ruang dapat menciptakan ruang-ruang wacana baru tentang identitas di mana terjadi interaksi antara individu-individu yang “tercabut” dari asal mereka, tetapi masih memiliki kesamaan referensi identitas etnik.

Berikut ini akan diperlihatkan secara rinci bagaimana bahasa dan religi dapat menjadi representasi identitas etnik di Balangan. Ada faktor pelaku yang dioperasionalkan dalam beberapa kasus dan ada perpindahan ruang yang dapat

menghadirkan wacana baru bagi penutur bahasa dan bagi kelompok etnik penganut agama yang dominan di daerah ini, yaitu Islam.

5. Hetrogenitas Etnik dan Homogenitas Bahasa

Dalam bagian ini akan dideskripsikan kelompok-kelompok etnik yang ada di kecamatan Paringin dan bahasa yang dituturkannya. Dalam hal ini bahasa diperlakukan sebagai suatu tanda yang merujuk pada identitas etnik. Akan pula diperhatikan aktor pelaku bahasa yang bermigrasi ke daerah penelitian sebagai “liyan”. Dalam deskripsi ini akan jelas tampak bagaimana proses wacana “liyan” menjadi “aku” (*self*) dalam membentuk identitas etnik.

5.1. Hetrogenitas Etnik

Tabel 1 di muka yang didasarkan pada data BPS yang merujuk pada sensus penduduk tahun 2000, memperlihatkan bahwa orang Banjar tampak mendominasi seluruh kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Hal itu dapat dimengerti karena menurut sejarah asal-usulnya, penduduk “asli” Kalimantan adalah orang Dayak yang karena percampurannya dengan orang Melayu, lahirlah kelompok etnik Banjar ini, dan di Kalimantan Selatan kelompok Dayak Maanyan lah yang mendominasi percampuran itu. Dalam perkembangannya orang Banjar kemudian dikenal identik dengan Islam, karena mereka menjadi pemeluk Islam secara formal sejak berdirinya kerajaan Banjar pada awal abad ke 16.

Pada tahun 2003 ini di mana kabupaten Balangan yang terdiri dari kecamatan Lampihong, Batu Mandi, Awayan, Paringin, Juai dan Halong, orang Banjar tetap dominan. Mereka terbanyak ada di kecamatan Paringin, dan hal ini sebenarnya tidak lah mengherankan karena Paringin adalah ibu kota. Paringin juga mempunyai jumlah penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan wilayah lain di balangan. Selain orang Banjar sendiri, kecamatan ini mempunyai keragaman suku bangsa; Jawa, Bugis, dan Madura yang cukup banyak dibandingkan dengan proporsi di kecamatan-kecamatan lain. Hal itu disebabkan karena Paringin banyak didatangi oleh migran, tidak saja dari luar kota Paringin, dari luar Balangan, dari luar Kalimantan Selatan, tetapi juga dari luar Jawa.

Menarik untuk memperhatikan konsep *Jawa* menurut konstruksi orang Paringin. Bagi mereka, semua orang yang tidak berasal dari Kalimantan, disebut “orang Jawa”. Baik mereka yang memang berasal dari pulau Jawa sendiri, seperti orang Jawa dan Sunda, maupun mereka yang berasal dari daerah-daerah di Sumatera seperti orang Batak dan Padang, serta mereka yang berasal dari Sulawesi disebut pula sebagai orang Jawa. Kalau demikian, *Jawa* tidak hanya merujuk pada pulau Jawa saja, tetapi juga pada untuk daerah-daerah di luar Kalimantan.

Selain orang Jawa, orang Bugis yang ada di Paringin juga cukup besar jumlahnya, di samping oang Madura, seperti yang tertera dalam tabel 1 di muka. Orang Sunda hampir mendominasi kelompok-kelompok etnik lain, selain Jawa, karena tidak jauh dari Paringin ada kampung-kampung

transmigran orang Sunda dari Ciamis. Di antara mereka ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga keluarga Jawa. Perlu dicatat bahwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga adalah ciri khas mata pencaharian di Jawa, dan orang Kalimantan Selatan secara harafiah tidak mengenal adanya pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.

Keberagaman etnik yang disebabkan karena perpindahan penduduk, baik secara resmi sebagai transmigran atau sebagai pegawai dan buruh tambang batu bara, PT. Adaro yang cukup besar, sebagai guru yang menjadi pegawai negeri, dan berdagang di pasar. Selain orang Banjar dan Jawa, tabel 1 juga memperlihatkan adanya orang Bugis, Madura, Bakumpai dan kami menemui beberapa orang Padang dan Batak yang menurut tabel 1 termasuk dalam kategori lain-lain. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa di Paringin khususnya Paringin Timur, masyarakatnya cukup heterogen.

Kalau kecamatan Paringin dikenal sebagai wilayah yang penduduknya sangat heterogen, maka kecamatan Halong adalah daerah di mana penduduknya sangat homogen. Tabel 1 tersebut di atas memperlihatkan bahwa dari kategori kelompok-kelompok etnik, kelompok etnik "lainnya" di Halong menunjukkan persentase yang cukup besar. Kategori tersebut secara implisit sebenarnya merujuk pada orang Dayak. Dugaan ini diperkuat dalam tabel 2 yang memperlihatkan bahwa agama Budha dianut oleh penduduk asli (dan bukan orang Cina yang secara umum dikenal sebagai penganut Budha), demikian juga halnya dengan Protestan, Hindu (dan bukan dianut oleh orang Bali sebagaimana dikenal umum) dan Katolik. Daerah yang

dihuni secara homogen oleh orang Dayak sebagai penduduk asli, tetapi tampak mempunyai heterogenitas agama yang ditandai dengan adanya berbagai rumah ibadah di daerah ini.

5.2. Homogenitas Bahasa

Sehubungan dengan adanya keberagaman etnik di ibu kota kabupaten Balangan ini, perlu kita pertanyakan bahasa apakah yang digunakan oleh masyarakat Paringin? Dari hasil observasi dan wawancara, masyarakat Paringin tidak mempunyai kesulitan untuk menuturkan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Banjar dapat didengar di rumah-rumah penduduk, di pasar, di kantor dan di sekolah-sekolah. Dengan demikian, berdasarkan fungsi tampaknya bahasa Banjar merupakan *lingua franca* di Paringin ini.

Kalau bahasa dapat dianggap sebagai alat komunikasi yang dituturkan paling sedikit oleh dua orang atau lebih yang sedang berkomunikasi, maka bagaimana halnya apabila salah seorang dari penutur itu tidak berbahasa Banjar sebagai bahasa ibunya meskipun ia tinggal di wilayah kabupaten Balangan khususnya Paringin yang masyarakatnya menuturkan bahasa Banjar (baca: Paringin Hulu, sub-dialek Paringin)? Atau, dalam arti yang lebih luas, bagaimanakah satu kelompok etnik yang tidak berbahasa Banjar melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok etnik yang mempunyai bahasa ibu, Banjar.

Ada tiga hal yang akan dilaporkan di sini, yang dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan bahasa dalam perannya sebagai alat komunikasi. *Pertama*, adalah interaksi yang

dilakukan oleh kelompok-kelompok etnik yang berbeda bahasa ibu. *Kedua*, Secara khusus kelompok etnik yang berbeda bahasa ibu, akan dilihat dalam kesatuan keluarga batih. *Ketiga* adalah proses penggunaan bahasa Banjar dialek Hulu dan subdialek Paringin, yang dikaji melalui beberapa kasus penutur bahasa para migran, yang tampak hidup membaur bersama orang Paringin.

Pertama, uraian ini akan memperlihatkan bahasa yang digunakan dalam interaksi kelompok-kelompok etnik yang berbeda. Seperti telah diuraikan sebelumnya, penduduk “asli” Kalimantan adalah orang Dayak, dan di kabupaten Balangan mereka termasuk dalam kelompok Dayak Balangan yang terbedakan dari Dayak Gunung Riut dan Dayak Pitab. Orang Dayak Balangan menuturkan bahasa *Dayak Balangan* dalam berinteraksi dengan sesama warga kelompok etniknya. Bahasa Dayak Balangan sebenarnya merupakan bagian dari bahasa Dayak yang lebih besar, yaitu *Maanyan*. Sehingga orang Dayak Balangan bisa mengerti bahasa Maanyan, tetapi orang Maanyan tidak mengerti bahasa yang dituturkan oleh orang Dayak Balangan. Oleh sebab itu, lebih sering dituturkan bahasa Maanyan sebagai *lingua franca* di antara orang Dayak.

Apabila kelompok penutur lebih beragam bahasa ibunya, orang cenderung menggunakan bahasa Banjar. Hal ini terjadi di kecamatan Halong, suatu saat beberapa orang dari kelompok etnik yang berbeda terlibat dalam tuturan. Ada orang Sunda yang menjadi pegawai kecamatan, beberapa orang Dayak yang tinggal di Kapul dan dikenal sebagai Dayak Maanyan, orang Dayak dari Tabalong dan orang Banjar Kuala. Mereka

menuturkan bahasa daerah yang menurut keterangan ternyata adalah bahasa Banjar.

Kedua, kalau dalam pembicaraan sehari-hari bahasa Banjar dituturkan sebagai alat komunikasi oleh kelompok-kelompok etnik yang berbeda bahasa ibunya, maka bagaimanakah hal itu terjadi dalam suatu keluarga batih? Perkawinan antar etnik dirasa perlu dikaji untuk mengetahui secara tepat bahasa yang dituturkan di rumah oleh mereka yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Beberapa kemungkinan diduga dapat timbul, pertama adalah mereka yang kuat dapat mempengaruhi tuturan yang digunakan di rumah dan hal ini menjadi lebih nyata apabila didukung oleh tuturan yang digunakan oleh lingkungan. Misalnya seorang pria Paringin yang menikah dengan orang Jawa, besar kemungkinannya bahwa di rumah dituturkan bahasa Banjar Hulu sub-dialek Paringin. Hal itu disebabkan karena di luar rumah perempuan Jawa itu harus berkomunikasi dengan penutur-penutur sub-dialek Paringin, sehingga ada "keharusan"nya untuk belajar bahasa. Kedua, anak-anak yang lahir dari ayah dan ibu yang berbeda bahasa ibunya, ada kemungkinan untuk menggunakan tuturan ibunya sebagai bahasa ibu, tetapi bukan tidak mungkin bahwa ia menuturkan bahasa yang digunakan oleh lingkungannya. Kalau ayah tidak menuturkan bahasa ibu, biasanya lingkungan turut ambil bagian. Dalam kasus serupa ini ibu akan larut dalam tuturan ayah yang diperkuat oleh lingkungan, dan anak sesuai dengan pergaulannya cenderung menggunakan bahasa yang dituturkan di lingkungannya. Bagaimana pun kondisi realitas kebahasaan ini dapat diketahui dari tabel yang

Tabel : 2
 Status Perkawinan dan Kelompok Etnik Di Paringin Timur

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	230	1	5	3	1	4	4	2	4	2	-	2	-	2	1	1	-	-
2	18	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Keterangan:

1. Paringin
2. Jawa
3. Amuntai
4. Halong
5. Kutai
6. Juwai
7. Lamphihong
8. Kelua
9. Banjar Baru
10. Banjarmasin
11. Barabai
12. Kandangan
13. Bukit
14. Awayan
15. Sumatera
16. P.Hambawang
17. Tabalong
18. Cina Paringin

memperlihatkan hubungan antar etnik dalam perkawinan di Paringin Timur.

Bagan tersebut di atas menunjukkan hubungan etnik dalam arti hubungan-hubungan di antara *tribe*. Konsep yang dikenal dalam Antropologi ini, oleh masyarakat setempat disebut “orang” yang menunjukkan asal suatu kelompok masyarakat. Pengelompokan terhadap konsep “orang-orang” itu tampaknya didasarkan pada suatu wilayah kecamatan (Paringin, Amuntai, Halong, Kutai, Juwai, Lampihong, Kelua, Bukit, Awayan dan Tabalong), Kodya (Banjar Baru, Banjarmasin), Kota (Barabai, Kandangan, Amuntai), Pulau (Jawa, Sumatera – tadinya dianggap sebagai Jawa, tetapi setelah dilakukan wawancara mendalam, diakui bahwa ada pulau Sumatera), kelompok etnik (Cina Paringin). Orang Banjarmasin yang dalam tabel disebut dengan nama Banjarmasin saja, menurut informan adalah mereka yang lahir dan/atau dibesarkan di kota itu. Mereka yang berasal dari kecamatan-kecamatan yang ada dalam wilayah Kodya Banjarmasin, tampaknya tidak diperhitungkan sebagai suatu kelompok tersendiri dan dianggap sebagaimana layaknya orang Banjarmasin saja. Dengan demikian berdasarkan konstruksi masyarakat setempat, Paringin Timur dihuni oleh 18 kelompok etnik (baca:orang) seperti yang tercantum dalam tabel tersebut di atas.

Tidak semua kepala keluarga masuk dalam hitungan tabel tersebut di atas, karena ada kepala-kepala keluarga yang tidak mempunyai pasangan hidup, janda atau duda, dan ada beberapa di antaranya yang masih lajang. Tabel tersebut memperlihatkan

bahwa kebanyakan pasangan (230 perkawinan) di Paringin Timur terjadi antara suami yang orang Paringin dengan istrinya yang orang Paringin juga. Setelah itu keluarga Jawa, suami Jawa dengan istri Jawa juga cukup tinggi jumlahnya (33 perkawinan), dan masih ada pria Jawa yang menikah dengan istri yang berasal dari Paringin (18 perkawinan), dan hanya ada seorang pria Paringin yang menikah dengan perempuan Jawa. Selain dari keempat kelompok etnik besar (Paringin-Paringin, Jawa-Jawa, Jawa-Paringin, Paringin-Jawa), masih ada beberapa perkawinan campur. Seperti perkawinan antara orang Paringin dengan Amuntai, Paringin dengan Juwai, dan Paringin dengan Lampihong, keduanya masih dalam lingkungan kabupaten Balangan. Frekwensi jumlah pasangan, secara tepat dapat diketahui dari tabel 2 tersebut di atas.

Dari informasi yang diperoleh, bahasa yang dituturkan di Paringin Timur ini adalah bahasa Banjar, dialek Hulu (Banjar Hulu) dan sub-dialek Paringin. Keluarga-keluarga yang terdiri dari suami-istri dengan bahasa ibu yang berbeda, tampaknya juga menggunakan bahasa yang dituturkan oleh semua orang. Ada sedikit perbedaan antara bahasa yang digunakan di wilayah kabupaten Balangan dengan bahasa-bahasa di sekitarnya. Misalnya dengan kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ibu kotanya Barabai, perbedaan itu hanya ada pada pengucapan bunyi a dan e.

Ketiga, proses penggunaan sub-dialek Paringin oleh para migran perlu juga diketahui untuk melihat kekuatan tuturan ini. Kalau bahasa dapat dianggap sebagai alat komunikasi, maka wadah dari komunikasi itu sendiri dapat muncul dari berbagai

bentuk. Yaitu dalam rumah tangga keluarga batih, dalam keluarga luas, dalam berbagai kegiatan antar warga sekampung, dan sebagainya. Ada satu bentuk khusus wadah komunikasi semacam ini di daerah penelitian, yaitu pada saat memperingati Maulud Nabi. Beberapa keluarga mengadakan *limit* yaitu undangan untuk memperingati Maulud Nabi. Pada acara ini tetangga terdekat harus diundang, kadangkala seluruh warga RW itu diundang. Tetangga biasanya tidak dapat menolak *limit*, karena merasa tidak enak dan takut untuk digunjingkan. *Limit* seperti ini dilakukan secara bergiliran di antara para tetangga. Mereka yang tidak pernah mengadakan *limit* disebut *pemala* yang berarti pelit. *Limit* dapat juga dilakukan oleh mesjid atau langgar. Apabila langgar di Paringin Kota melakukan *limit* maka seluruh warga Paringin Timur dan Paringin Barat itu diundang. Demikian juga halnya, kalau langgar di Paringin Timur melakukan *limit*, maka warga Paringin Kota dan Paringin Barat “harus” datang.

Uraian singkat tentang *limit* tersebut di atas memperlihatkan bahwa seseorang yang telah menjadi warga Paringin, termasuk para migrannya, melalui kebiasaan *limit* ini diwajibkan untuk bergaul dengan sesama warga. Di sinilah undangan merayakan Maulud Nabi dapat dijadikan sarana memperlancar bahasa bagi para pendatang.

Bahasa Banjar dialek Hulu, sub-dialek Paringin dituturkan di seluruh kabupaten Balangan. Menariknya, di kota Paringin yang merupakan ibu kota kabupaten Balangan itu, bahasa ini tidak hanya dituturkan oleh orang-orang Banjar saja tetapi juga para migran pendatang khususnya kalau ada *limit*, baik itu oleh

anak-anak mereka di sekolah, dalam pergaulan di lingkungan rumah, di pasar di mana bahasa itu digunakan sebagai bahasa perdagangan, maupun di kantor pemerintah dan swasta.

Ada suatu kasus cukup menarik, yang menunjukkan kelincahan bertutur seorang anak. Fahrudin adalah seorang penduduk Paringin yang lahir di Barabai (i.b. kabupaten Hulu Sungai Tengah), istrinya juga orang Barabai. Fahrudin pada masa Orde Baru bekerja pada Kandep. Pendidikan dan Kebudayaan. Pada mulanya ia bekerja di Barabai kemudian diperbantukan di Kota Baru. Anak suami-istri Fahrudin yang lahir pada tahun 1989, sejak tahun 1991 ikut orang tuanya yang ditugaskan di Kota Baru. Masyarakat daerah ini menuturkan bahasa Banjar bercampur dengan bahasa Bugis, karena migran Bugis cukup banyak di sini. Anak Fahrudin sangat lancar menggunakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Kota Baru, karena keluarga ini lima tahun tinggal di Kota baru. Cukup lama untuk bisa mengadaptasi bahasa. Sejak tahun 1996, sampai saat penelitian ini dilakukan Fahrudin bekerja sebagai penilik kebudayaan di kecamatan Awayan yang tinggal di kota Paringin. Anaknya yang sekarang berusia 12 tahun, sekolah dan hidup sebagaimana halnya anak-anak Paringin yang lain. Ia pun menggunakan bahasa Banjar dengan dialek Paringin, dan bahasa yang dipelajarinya di Kota baru, saat ini sudah dilupakannya. Fachruddin sendiri dan istri menurut keterangannya, setelah tujuh tahun tinggal di Paringin, berbahasa dengan menggunakan dialek di Paringin.

Kemampuan para migran untuk menuturkan bahasa Banjar Hulu dengan sub-dialek Paringin tidak hanya dimiliki oleh

anak-anak saja. Erlina yang berasal dari Medan, di Sumatera Utara, Nina yang orang Padang dan Aryati yang berasal dari Semarang, adalah guru-guru Sekolah Luar Biasa Paringin. Erlina yang lajang itu bekerja di Paringin karena mutasi, sedangkan keberadaan Nina dan Aryati di Paringin karena ikut suami yang bekerja di PT. Adaro. Kalau Erlina dan Nina tinggal di kompleks perumahan Perumnas yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik, maka Aryati tinggal berbaur dengan kebanyakan warga Paringin yang lain.

Ketiga ibu itu kedengaran bertutur dalam bahasa Banjar saat bercakap dengan sesama guru di sekolah tempat mereka mengajar itu. Bahasa Banjar Hulu sub-dialek Paringin dipelajari dari pergaulan. Menurut keterangan, mereka belajar tidak dengan secara sadar menghafalkan kata-kata atau dengan cara menuliskannya tetapi dilakukan secara spontan mengikuti formula yang digunakan oleh rekan-rekannya di tempat kerja atau saat berbelanja.

Kelincahan bahasa Banjar Aryati tidak mematikan bahasa Jawanya, karena suaminya juga masih berbahasa Jawa meskipun mereka menggunakan bahasa Banjar saat berkumpul di rumah. Maklum sebab anak-anak tidak dapat lagi berbahasa Jawa. Aryati sendiri tetap mempunyai hubungan yang baik dengan tempat asalnya, satu atau dua kali dalam setahun ia pulang ke Semarang. Rumah Aryati juga dihunhi oleh orang Sunda yang bekerja sebagai pembantu, dan diambilnya dari daerah transmigrasi.

Apa yang hendak dikatakan di sini adalah, bahwa sub-dialek Paringin di Paringin dituturkan sebagai *lingua franca*. Bahasa ini tidak hanya dituturkan oleh orang-orang Paringin, tetapi juga oleh para pendatang, tidak saja anak-anak tetapi juga orang dewasa, yang bagi para migran harus diusahakan dengan cara belajar sendiri.

5.3. Nan Sarunai; Hetrogenitas Etnik & Homogenitas Bahasa Dalam Tradisi Lisan

Fridolin Ukur dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar theologi di Jakarta (1971:80), menyebut nama Nan Sarunai yang dari penelitiannya muncul dalam *nyanyian wadian* dan cerita tradisional. Menurut tradisi yang dilisankan itu Nan Sarunai adalah kerajaan orang Dayak Maanyan yang pernah mengalami jaman keemasan. Wilayah Nan Sarunai meliputi seluruh Barito Timur sampai ke Tanah Pasir. Kerajaan ini kemudian lenyap karena *usak Jawa*, berarti dihancurkan oleh Jawa. Bila dihubungkan dengan sejarah kerajaan Jawa, kerajaan terbesar yang pernah mencakup nusantara ini adalah Majapahit, dan daerah yang pernah dikuasai di Kalimantan adalah tempat kediaman orang Dayak Maanyan, yaitu Barito, Pasir dan Tabalong.

Wawancara dengan seorang informan, Djantera Kawi, menyebutkan bahwa Nan Sarunai adalah kerajaan Melayu tua. Raja kerajaan ini mempunyai lima orang anak yang setelah dewasa pergi mencari kehidupan masing-masing. Ada yang pergi ke arah utara dan menurunkan Dayak Iban, ada yang pergi ke Barat dan menurunkan Dayak Ngaju, ada yang ke timur

menurunkan Dayak Abal dan ke Selatan menurunkan Dayak Awayan. Keempat anak Nan Sarunai yang pergi tersebar ke arah mata angin, bisa dihubungkan oleh seorang anak nan Sarunai yang berdiri di tengah keempat saudara-saudaranya, yaitu orang Banjar. Keturunan ke lima orang anak Nan Sarunai ini kemudian dikenal tinggal di daerah yang disebut *Banua Lima*, dan orang Banjar menjadi *Dangsanak* yaitu saudara tuanya orang Dayak.

6. Religi; Representasi Identitas

Sebagaimana halnya bahasa, dalam laporan ini religi juga diperlakukan sebagai representasi identitas, karena ada kontestasi wacana dalam pembentukan identitas religi yang melibatkan “liyan”. Dalam laporan ini juga akan diperlihatkan bagaimana aktor pelaku yang menafsirkan makna identitas “liyan” itu dengan menginternalisasi dan mengkontemplasikannya ke dalam bentuk “aku”.

Dalam antropologi, religi suatu kelompok etnik dapat dibicarakan dari tiga sudut pandang; aspek fisik, komunitas dan esensi religi itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan religi itu pun bukan hanya agama formal yang diakui oleh negara, tetapi juga kepercayaan kelompok-kelompok etnik yang diteliti. Deskripsi ini tidak akan melaporkan ketiga aspek yang ada dalam religi, juga tidak dalam hal esensi religi, karena laporan hanya akan ditekankan pada aspek komunitas religi tersebut. Hal itu disebabkan karena aspek komunitas ini lah yang sangat berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam sub-bab ini akan dibicarakan

secara khusus dua hal, yaitu Islam sebagai Religi dan Sistem Kepercayaan masyarakat Paringin. Ada tiga hal yang akan dibicarakan di sini, yaitu Islam Sebagai Religi, Sistem Kepercayaan, serta Islam dan Identitas Etnik.

6.1. Islam Dalam Sejarah Identitas

Tabel berikut memperlihatkan frekwensi persebaran agama di kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan. Perlu diingatkan kembali, bahwa kabupaten Balangan adalah hasil pemekaran kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan demikian enam kecamatan kabupaten Balangan tadinya ada dalam wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel: 3
Penduduk Menurut Wilayah Administrasi dan Agama
Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan tahun 2000

	A g a m a							Jumlah
	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya		
Danau Panggang	25,647	1	1	2	3	0	25,654	
Babirik	17,192	0	1	2	0	15	17,210	
Sungai Pandan	38,121	5	5	1	4	1	38,137	
Amuntai Selatan	24,071	4	11	2	0	0	24,088	
Anubtai Tengah	42,206	23	38	18	13	17	42,315	
Banjang	15,063	10	2	1	5	0	15,081	
Amuntai Utara	33,681	9	4	5	0	1	33,700	
Lampihong	14,566	1	1	0	0	0	14,568	
Batu Mandi	13,563	1	11	0	0	0	13,575	
Awayan	14,660	6	46	608	10	498	15,828	
Paringin	20,866	18	42	7	3	1	20,937	
Juai	13,682	11	22	0	0	15	13,730	
Halong	11,881	165	318	263	536	3	17,166	
Jumlah	285,199	254	502	909	4,574	551	291,989	

Sumber: BPS. Kabupaten HSU., Hasil Sensus Penduduk 2000

Tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa di kabupaten Balangan, penganut Islam yang terbanyak ada di Paringin (...%). Sangat mencolok adalah banyaknya pemeluk Katolik di kecamatan Halong yang ibu kotanya Kapul. Pernah kami kunjungi Kapul yang pluralitas agamanya cukup tinggi. Di desa ini, sama seperti halnya dengan seluruh kecamatan Halong, pemeluk Katolik mempunyai frekwensi yang tertinggi baik di kecamatan-kecamatan lain di seluruh kabupaten Balangan, maupun di seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kalau kita masuki desa Kapul, di jalan utamanya berderet apa yang oleh masyarakat setempat disebut dengan gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Bethel (yang sebenarnya tampak lebih sebagai rumah penduduk biasa) dan agak di belakang bangunan itu ada vihara yang luas dan asri. Kecamatan Halong dan khususnya desa Kapul, mayoritas penduduknya adalah orang Dayak yang mempunyai frekwensi perkawinan lintas agama cukup besar pula. Di daerah ini dikenal konsep *pabujuran* yang arti harafiahnya harus benar-benar beragama; kalau Katolik, harus menjadi Katolik yang benar, kalau Islam juga harus menjadi Islam yang benar, kalau Budha harus menjadi seorang Budha yang taat. Adalah pemandangan biasa kalau mendirikan atau memperbaiki sebuah mesjid dilakukan secara bergotong-royong di antara warga desa yang berlainan agama.

Agama Katolik masuk ke Halong sekitar tahun 1980-an dan setelah tiga tahun, tidak lagi dilakukan ibadat Katolik

karena tidak ada umatnya. Baru pada tahun 1988 Katolik tampak hidup lagi karena datang Zaini, seorang katekis yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri Uren, yang termasuk kabupaten HSU. Istrinya, Natalia juga seorang guru di SD negeri Gunung Riut. Kalau Zaini adalah orang Dayak yang berasal dari Halong, maka istrinya adalah perempuan Dayak dari Kalimantan Tengah. Pada hari Minggu, Zaini juga memimpin upacara keagamaan dalam ibadat umat Katolik di Halong. Sedangkan di Paringin umat Katoliknya hanya 18 orang yang beribadat ke Halong atau Amuntai. Di kabupaten Balangan sendiri sebenarnya masih banyak pengikut agama asli yang disebut Kaharingan, meskipun di Paringin sendiri hanya ada satu orang.

Agama Kristen masuk ke daerah ini lebih dahulu dari Katolik, yaitu pada tahun 1960-an, meskipun para missionaris telah masuk ke Kalimantan Selatan sejak tahun 1835 (Fridolin Ukur, tesis 1971:88).

Kalau dalam tabel 1 tampak bahwa orang Banjar mendominasi tidak hanya kecamatan Paringin tetapi juga di wilayah-wilayah lain khususnya dalam kabupaten Balangan, maka sebenarnya orang dapat menarik korelasi antara orang Banjar dengan Islam, dan hal ini dapat menjadikan Islam identik dengan orang Banjar.

Hubungan antara Islam dan Banjar tidak terjadi demikian saja, tetapi melalui suatu proses yang bertahap. Sebelum Islam dikenal di daerah ini, di Kalimantan Selatan ada dua kerajaan Hindu yaitu Negara Dipa dan Daha.

Kerajaan Islam Banjar muncul pada abad ke 16 setelah Pangeran Samudra memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Suriansyah. Pangeran Samudra adalah seorang pelarian politik yang disingkirkan oleh Pangeran Tumenggung, pamannya. Hal itu disebabkan karena ia adalah cucu Maharaja Sukarama dari kerajaan Daha di daerah Hulu Sungai, yang mewasiatkan kerajaannya pada Pangeran Samudra yang saat raja wafat baru berusia 7 tahun. Oleh sebab itu, menunggu Pangeran Samudra cukup dewasa, kerajaan dipimpin oleh walinya yang tidak lain adalah Pangeran Tumenggung. Sayangnya bahwa setelah tiba saatnya, Pangeran Tumenggung tidak bersedia melepaskan kerajaan yang telah dipimpinnya itu, bahkan Pangeran Samudra hendak ditangkap. Pangeran Samudra melarikan diri ke muara sungai Barito di daerah mana terdapat perkampungan orang-orang Melayu dan orang Dayak Ngaju. Pemimpin kedua kampung itu sepakat untuk menjadikan Pangeran Samudra sebagai raja mereka, dengan dua alasan.

Pertama, karena Samudra adalah juga seorang bangsawan kerajaan, maka ia dianggap layak untuk memimpin kerajaan. Kedua penduduk kedua kampung itu tidak mau tunduk dan tidak mau lagi membayar upeti pada kerajaan yang berada jauh di Hulu Sungai, karena itu kehadiran Pangeran Samudra disambut. Kemudian ia pindahkan bandar kerajaan dari Muara Bahan ke Bandarmasin (kemudian menjadi Banjarmasin). Pedagang-pedagang asing lebih senang dengan Bandarmasin, karena letaknya yang lebih dekat ke laut. Pangeran Tumenggung menganggap pemindahan bandar ini sebagai

suatu pemberontakan, karena bandar adalah tulang punggung perekonomian negara. Perang antara Daha dan kerajaan Banjar pun tidak dapat dihindari lagi.

Peperangan sungai yang pertama dimenangkan oleh Pangeran Samudra. Kedua kerajaan itu kemudian mengantisipasi adanya peperangan kedua, sehingga masing-masing pihak berusaha mencari bantuan. Pangeran Samudra mencari bantuan tidak saja di seluruh pelosok Kalimantan seperti Sambas, Sampit, Kota Waringin, Kutai dan Berau, tetapi juga sampai ke Demak di pulau Jawa. Demak bersedia membantu dengan syarat, yaitu bahwa raja dan seluruh rakyat kerajaan Banjar harus memeluk Islam apabila Pangeran Tumenggung dapat dikalahkan. Sesuai perjanjian antara Pangeran Samudra dengan kerajaan Demak, maka dengan takluknya Pangeran Tumenggung, Pangeran Samudra memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi **Sultan Suriyansyah** dan Islam dijadikan agama negara.

Berdasarkan hasil penelitian Panitia Hari Jadi Kota Banjarmasin (Gazali Usman, 1994:26), Pangeran Samudra di-Islamkan oleh wakil Penghulu Demak, Khatib Dayan pada tanggal 24 September 1526, atau tanggal 8 bulan Zulhijjah 932 Hijriyah. Sementara itu, hubungan dengan kerajaan Demak berjalan lancar dan juru dakwah didatangkan dari Demak. Meskipun demikian, untuk meng-Islamkan orang Banjar, pengaruh yang sangat besar datang dari orang Banjar sendiri yaitu Syekh Muhammad **Arsyad Al-Banjari**. Sejak itu lah, di antara orang Banjar, Islam merupakan agama yang dominan

dan tampaknya warna Islam mendominasi orang Banjar yang ada di seluruh provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini.

6.2. Sistem Kepercayaan di Paringin

Paham agama yang disebarkan oleh Al-Banjari adalah *Ahlussunah Waljamaah* yaitu paham yang mengamalkan segala ajaran nabi dan para sahabatnya. Ajaran Al-Banjari untuk memurnikan akidah Islam dengan melenyapkan upacara-upacara tradisional yang membahayakan akidah, ternyata kurang berhasil. Di Kalimantan Selatan penganut paham ini kemudian membentuk suatu organisasi yang dinamakan kelompok *Muhammadiyah*.

Muhammadiyah yang juga dikenal sebagai *Kaum Muda*, bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam, memperbaiki sistem pendidikan Islam dan memperbaiki kondisi sosial kaum Muslim. Di daerah Hulu Sungai ini penganut Muhammadiyah banyak terdapat di Alabio, daerah Amuntai, kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam organisasi dikenal pula Nahdatul Ulama (NU), yaitu para penganut Islam yang tetap menjalankan aturan dan kebiasaan-kebiasaan dalam tradisinya. Di Paringin NU tampak mayoritas, sehingga adat dan kebiasaan dapat tetap berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah contoh kepercayaan yang dikenal dalam masyarakat Paringin, dan ditransformasikan pada para migran. Sehingga migran yang datang ke Paringin lambat laun lebur dalam kepercayaan masyarakat.

Piduduk

Piduduk adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap upacara atau pada saat-saat tertentu. *Piduduk* dapat terdiri dari kelapa bulat beserta tempurungnya, beras, telur ayam kampung satu biji, gula merah sebuah. Informan lain mengatakan bahwa *piduduk* dapat pula berupa ayam, gula, kopi, rokok, dan air putih yang harus disajikan. Sajian ini boleh diletakkan di mana saja dan boleh disertai dengan doa, maupun tidak. Bila suatu upacara tidak disertai dengan *piduduk*, maka biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya orang menjadi sakit.

Erlina, seorang guru dari Medan mengatakan bahwa ketika datang di Paringin, ia tidak mengerti kepercayaan di daerah ini. Tetapi kemudian ia juga mengalami hal-hal yang dipercayai oleh masyarakat setempat, dan sejak itu Erlina pun turut menjalani upacara. Pada suatu hari ketika bangun tidur, kakinya serasa dicubit tetapi yang tampak adalah sebuah gambar hati. Ia ke dokter, tetapi dari sehari ke hari lain keadaannya bertambah buruk. Kemudian oleh teman-temannya ia dibawa ke “orang pintar” dan disuruhnya membuat *piduduk* yang diletakkan dalam kamar. Segera setelah *piduduk* itu disajikan, kaki Erlina pun sembuh. Menurut keterangan “orang pintar” itu Erlina terkena roh halus yang sedang bertandang ke rumah itu.

Kasus realitas dalam hal kepercayaan juga dialami oleh Nina yang berasal dari Padang. Selama tinggal di Paringin, ia sudah menyaksikan ada dua janin bayi yang hilang begitu saja dari kandungan si ibu. Salah seorang suami dari ibu yang hamil

itu, beberapa waktu kemudian sering “bertemu” dengan seorang “anak” yang sedang bermain dan ia percaya bahwa anak itu adalah anaknya yang hilang di dalam kandungan satu-dua tahun yang lalu.

Peristiwa hilangnya “anak” atau sebenarnya adalah janin, dari dalam kandungan, menurut konsep setempat karena janin itu diambil oleh *kuyang*, yaitu mahluk gaib. *Kuyang* yang juga disebut *uyang* hanya terdiri dari kepala dan usus (yang terburai), terbang mencari ibu-ibu hamil untuk dijadikan mangsanya.

Seorang informan lain yang berasal dari Sulawesi Selatan menceritakan bagaimana mahluk gaib mengganggu anaknya. Anaknya yang masih balita jatuh dari loteng yang dikelilingi oleh pagar yang cukup tinggi yang menurut akal sehat hal itu tidak mungkin terjadi, karena pagar lebih tinggi dari tubuh si anak yang bejalanpun masih terbata-bata. Kemudian seorang pembantunya juga jatuh dari loteng yang sama setelah melihat seorang kakek tua berjanggal panjang. Menurut konsep setempat mahluk halus memang dapat melalui rumah-rumah orang, selain mereka juga dapat tinggal di rumah yang biasanya kosong. Mereka yang tinggal di rumah, biasa disebut *penunggu* rumah.

Mahluk gaib bisa dicegah, supaya tidak masuk rumah dengan cara meletakkan ijuk di muka pintu yang disebut *penangkal*. Sebagai penangkal orang dapat meletakkan *jerengau* yaitu daun yang berbau busuk, dan juga bawang merah.

Dalam sistem kepercayaan ini ada istilah *betawaran* yaitu tawar-menawar yang dilakukan dengan roh halus. Misalnya seorang ibu yang sedang memasak, maka sebaiknya diambil sedikit dari masakan itu untuk diberikan pada mahluk halus. Kalau hal ini tidak dilakukan, roh halus itu bisa saja marah. Hal lain misalnya kalau seseorang memasak ketan, roh halus harus diberi sedikit, kalau tidak masakan itu akan basi.

Lingkar Kehidupan

Upacara-upacara yang berhubungan dengan lingkaran kehidupan patut dikemukakan, karena dapat dijadikan ciri kelompok etnik. Lingkar kehidupan orang Banjar pada umumnya, telah dibicarakan dalam buku yang merupakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977/1978). Apa yang dikemukakan dalam buku laporan penelitian itu, tampak berbeda dari upacara lingkaran kehidupan yang dikenal di Paringin.

Masa Hamil

Di Paringin ada upacara *mandi baia* yaitu upacara memandikan ibu yang hamil untuk pertama kalinya dengan usia kandungan 7 bulan. Upacara ini dipimpin oleh bidan atau dukun kampung. Beberapa orang ibu pendatang juga melaksanakan upacara ini, tetapi hal itu disebabkan karena

upacara semacam ini juga dilaksanakan di kampung asal mereka.

Kelahiran

Bayi yang baru lahir diletakkan di atas baki kuningan yang dinamakan *apar*. Ari-arinya ditaruh dalam kuali tanah yang disebut *kapit* dan ditutup dengan tempurung berlubang guna memasukkan sebilah bambu kecil supaya ari-ari tetap dapat bernafas meskipun ia dikuburkan. Pada malam hari orang memasang pelita di atas kubur ari-ari, sebagai tanda kalau di sana terkubur ari-ari. Ari-ari diperlakukan sebagai manusia karena ia dianggap sebagai saudara si jabang bayi.

Memberi nama

Upacara memberi nama bayi disebut *batapung tawar* yang sekaligus juga dimaksudkan sebagai perpisahan antara bayi dengan dukun yang merawatnya. Bayi akan *dipapai* dengan minyak goreng yang dicelupkan dengan daun pisang. Sebagai tanda perpisahan dan ucapan terimakasih, bidak atau dukun kampung diberi uang, kain dan barang-barang bernilai lainnya.

Masa Kanak-Kanak

Ada tiga upacara penting pada masa kanak-kanak, yaitu *batumbang apam*, *Hatam Quran* dan *khitan* bagi anak laki-laki. *Batumpang apam* dilakukan saat anak berusia 5-10 tahun. Benda upacara terpenting adalah kue apam yang disusun setinggi badan anak yang diupacarai itu, kemudian dibacakan

doa selamat. Pada akhir-akhir ini *batumpang apam* sudah jarang dilaksanakan meskipun masih ada beberapa orang Paringin yang tetap melaksanakannya.

Di Paringin ada kebiasaan untuk mengajar anak-anak membaca Al Quran. Apabila seorang anak telah *hatam* Quran diadakan upacara yang menggunakan ketan, lidi dan telur. Setelah upacara selesai, lidi dibagikan pada anak-anak yang hadir mengikuti jalannya upacara di tempat itu, sebagai alat tunjuk untuk membaca Quran, agar penerimanya juga cepat *hatam*.

Khitan dilakukan oleh baik anak laki-laki maupun perempuan. Kalau anak perempuan di khitan saat mereka masih bayi, maka anak laki-laki dikhitan saat usianya sekitar 7 tahun. Saat ini khitan dilakukan di Puskesmas saja dan tidak dirayakan. Dulu, sebelum kemerdekaan orang melakukan khitan dengan menggunakan sembilu.

Perkawinan

Lamaran yang dalam bahasa daerah disebut *bedetang* adalah awal dari upacara perkawinan, yang dilakukan oleh keluarga pria yang datang ke orang tua gadis untuk meminangnya. Sering juga mak comblang yang disebut *bapaparaan*, turun tangan apabila ada kesulitan dalam peminangan. Setelah lamaran diterima, terjadilah *batatalian*. Pada saat itu pihak mempelai laki-laki datang dengan membawa pakaian, cincin, peralatan perempuan, dan sebagainya, tergantung dari kemampuan pihak pria. Jarak

antara *batatalian* dengan nikah, sangat bervariasi, bisa seminggu hingga beberapa minggu atau bahkan lebih lama lagi tergantung kondisi masing-masing pihak.

Orang Paringin mengenal tiga jenis perkawinan, yaitu *kawin lari*, *ditampahi* yang juga disebut *kawin gantung*, dan *balarangan*. Kawin lari terjadi apabila orang tua tidak menyetujui hubungan kedua orang yang ingin menikah itu. Dalam situasi ini gadis dilarikan ke desa lain oleh pemudanya. *Balarangan* biasanya disertai dengan pertunangan, karena orang tua mempelai telah menyetujui rencana perkawinan anak-anak mereka, namun belum dilaksanakan pesta perkawinan itu.

Rangkaian upacara perkawinan mengenal *bapapai* yaitu mandi-mandi. Kedua pengantin itu dimandikan dengan bunga pinang yang disebut *mayang* yang dicelupkan ke air bunga yang disebut *rampai*. Upacara mandi-mandi seperti halnya dalam kelahiran, dipimpin oleh bidan kampung.

Dalam upacara perkawinan digunakan *halarat* yaitu ketan yang diberi gula jawa dan ditaburi kelapa. Orang percaya bahwa *halarat* dapat mencegah roh halus. Selain itu, upacara perkawinan juga harus dilengkapi dengan *kukulih* yaitu tepung beras yang dimasak dengan pandan, sehingga bentuknya mirip bubur. Biasanya setelah orang selesai memasak *kukulih*, diambil sepiring untuk roh-roh halus yang bisa diletakkan di mana saja. Kalau roh halus tidak diberi *kukulih*, maka seluruh *kukulih* akan basi. Selain *kukulih* roh halus juga harus diberi

piduduk. Apa yang menjadi bagian dari *piduduk*, telah disebutkan di atas.

Kematian

Kalau ada kematian yang tidak bisa langsung dikuburkan sehingga jenazah masih harus disemayamkan, maka pada malam hari orang berjaga dengan membaca Yasin atau Al Quran. Malam menjaga jenazah disebut *lambur*. Ketika orang *takziah*, perempuan membaca (surat *kulhu* atau *tasbih*) dengan menggunakan daun kelapa yang telah disediakan. Setelah upacara penguburan selesai, daun kelapa ini disebarkan di atas kubur sebagai hadiah bagi si mati yang diberi nama *sindit*. Selesai upacara penguburan, para pelayat kembali ke rumah duka untuk makan bersama. Aktivitas makan bersama setelah upacara penguburan dinamakan *turun tanah*.

Orang Paringin mengenal konsep *mati bungkus* yaitu perempuan yang meninggal saat ia hamil. Kuburan perempuan hamil biasanya akan dijaga, paling tidak seminggu lamanya, karena keluarga si mati takut jenazah akan digali orang yang akan mengambil bayi dalam kandungan guna memperoleh kekuatan-kekuatan gaib.

6.3. Islam dan Identitas Etnik

Uraian sebelumnya telah memperlihatkan bahwa Islam sebagai religi cukup kuat, dalam arti penganutnya adalah kelompok etnik yang dominan di daerah penelitian, yaitu orang Banjar. Islam dan orang Banjar memang tidak dapat

dipisahkan. Oleh sebab itu Islam boleh dikatakan sebagai identitas kelompok etnik Banjar.

Akan tetapi baik di seluruh kabupaten Balangan maupun di Paringin, tidak hanya dihuni oleh orang Banjar saja. Ada berbagai kelompok etnik yang pindah ke wilayah obyek penelitian dari berbagai tempat di Indonesia ini, dan ada penduduk yang dianggap sebagai masyarakat “asli” di kawasan ini. Mereka adalah kelompok etnik Dayak yang di kabupaten Balangan tinggal mengelompok di kecamatan Halong.

Dipandang dari sudut katagori kelompok suku bangsa yang disusun berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 (tabel: 1), orang Dayak masuk dalam katagori suku bangsa “lainnya”. Hal itu tampak dari jumlahnya yang cukup besar dibandingkan dengan kelompok etnik lain, selain juga frekwensinya kelihatan mengumpul di kecamatan Halong yang memang dikenal sebagai daerah tempat tinggal orang Dayak Balangan. Dilihat dari sudut agama (tabel: 3), agama orang Dayak tampaknya dalam sensus penduduk juga dimasukkan dalam katagori “lainnya”, meskipun di Halong frekwensi katagori ini cukup kecil, karena kebanyakan orang Dayak di Halong menganut Budha, Protestan, Hindu dan Katolik, selain tentunya Islam. Hal itu mudah dimengerti, karena di desa Kapul terdapat wihara yang cukup besar dan tertata apik, serta stasi dari gereja Protestan dan Katolik juga terdapat di desa yang menjadi ibu kota kecamatan itu. Kondisi ini memperlihatkan telah terjadi perpindahan dalam ruang agama khususnya pada kelompok etnik Dayak; dari Kaharingan ke Islam, Kaharingan ke Budha,

Kaharingan ke Protestan, Kaharingan ke Hindu, dan Kaharingan ke Katolik.

Beberapa orang informan mengatakan bahwa orang-orang Dayak yang telah menganut agama Protestan, Katolik, Budha dan Hindu tidak mengalami banyak kesulitan dengan perubahan agama dan biasanya mereka tetap akan tinggal di kampungnya masing-masing. Hal itu disebabkan karena ada prinsip-prinsip yang secara konseptual tidak perlu diubah dengan drastis. Misalnya dalam hal daging babi, yang digunakan dalam upacara Dayak tetapi sangat diharamkan dalam dunia Islam. Oleh sebab itu, orang Dayak yang menganut Islam biasanya akan meninggalkan kampung halamannya dan mereka tidak lagi turut dalam acara-acara makan bersama. Meskipun demikian konsep *dangsanak* yaitu persaudaraan tetap dipertahankan. Berarti saudara-saudara pemeluk Islam yang berada di luar kampung, tetap akan sering mengunjungi keluarga-keluarganya di kampung. Oleh karena itu sudah menjadi pemandangan biasa apabila ada rumah tangga kelompok etnik Dayak yang menyimpan peralatan masak yang tidak digunakan. Tujuannya untuk digunakan saudara yang Muslim apabila mereka sedang berkunjung ke kampung.

Seperti telah diketahui, Islam adalah agama besar di daerah ini yang dianut oleh etnik Banjar yang tampak dominan pula di antara kelompok-kelompok etnik yang lain. Dari wawancara mendalam tampak bahwa orang Dayak yang masuk Islam akan mengidentifikasikan diri sebagai orang Banjar. Hal ini jelas tampak pada seorang gadis berkulit putih yang bekerja

di Hotel Tabalong, Tanjung. Ia beragama Islam dan yang secara fisik tampak sebagai gadis Dayak, mengenal terminologi-terminologi yang ada dalam bahasa Dayak, mengenal cara pengobatan Dayak dan lahir di daerah pedalaman tempat orang Dayak tinggal, tetapi tetap tidak mau mengakui bahwa dirinya orang Dayak.

Gejala tersebut di atas memperlihatkan bahwa gadis pemeluk Islam itu lebih senang masuk dalam identitas Banjar. Hal ini patut dipertanyakan, karena Banjar identik dengan Islam. Dengan kata lain, Islam dapat berperan sebagai identitas. Sebagai suatu identitas Islam telah mereferensikan makna tertentu pada kebudayaan Banjar. Pemaknaan kebudayaan Banjar sebagai identitas, tidak terjadi dengan sendirinya tetapi melalui suatu proses yang dibentuk dalam situasi sosial dan situasi historis tertentu. Sejarah memperlihatkan bahwa orang Banjar itu identik dengan *kemenangan, sukses dalam perdagangan, berpendidikan*, sedangkan Islam itu sendiri dalam perbandingannya dengan Kaharingan mempunyai konotasi dunia “modern” sekaligus sifatnya yang lintas etnik dan lintas kampung. Semua konotasi tentang orang Banjar tersebut di atas, merupakan ciri identitas yang patut dibanggakan, apalagi oleh orang Dayak telah menyandang identitas Islam. Dengan demikian sangatlah dimengerti apabila orang Dayak yang telah menganut Islam merubah identitas etniknya menjadi orang Banjar.

Sekarang tibalah saatnya untuk memperlihatkan ruang sejarah mana yang dapat melahirkan ciri identitas yang dirujuk oleh orang-orang Dayak yang beragama Islam. *Pertama*,

bahwa Banjar mempunyai konotasi dengan kemenangan dapat dihubungkan dengan berdirinya kerajaan Islam Banjar. Telah diuraikan sebelumnya bahwa Pangeran Samudra dengan dibantu oleh kerajaan Demak dapat mengalahkan Pangeran Tumenggung yang bergelar Pangeran Suriansyah dan mendirikan kerajaan Islam Banjar. Secara khusus kemenangan ini berarti kemenangan Islam dalam melawan Hindu. *Kedua*, konotasi antara orang Banjar dengan pedagang yang sukses juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Sejak abad ke 16 yang kemudian dilanjutkan sampai abad ke 17 daerah dan wilayah kerajaan Banjar dikenal sebagai penghasil rempah-rempah yang telah melakukan hubungan dagang dengan Cina, Portugis, kerajaan-kerajaan di Jawa, dan tentu saja dengan VOC. Pada abad ke 17 VOC bahkan mendapatkan monopoli perdagangan lada, kemudian dibuka perkebunan karet yang pasarannya juga mencapai seluruh dunia. *Ketiga*, konotasi orang Banjar dengan pendidikan. Tidak sedikit orang Banjar yang saya temui berusia di atas 65 tahun yang tidak bisa berbahasa Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa sejak jaman Belanda pendidikan dianggap cukup penting. *Keempat*, bahwa Islam adalah agama yang penganutnya lintas etnik dan lintas wilayah geografis.

Keempat ciri identitas ini bila dibandingkan dengan kebudayaan Dayak tampak lebih dinamis khususnya dalam berhubungan dengan dunia luar yang dapat diandaikan lebih "modern". Dengan demikian dapat lah dimengerti kalau ada orang Dayak yang memeluk Islam dan tidak lagi mengaku kelompok etnik asalnya yang Dayak itu. Dalam hal ini tampak bahwa identitas bukanlah suatu konsep yang tidak bisa berubah, karena tampak bahwa perubahan yang terjadi

disebabkan karena perpindahan aktor pelakunya, dari kelompok Dayak yang Kaharingan menjadi orang Banjar yang Islam.

6. Etnik dan Representasi Melalui Bahasa

Di sini akan diperlihatkan bahwa kabupaten Balangan khususnya Paringin, dihuni oleh berbagai kelompok etnik yang mayoritas adalah orang Banjar. Berbagai kelompok etnik itu dapat digolongkan ke dalam dua bentuk katagori, yaitu para migran dan penduduk “asli” Kalimantan yang orang Dayak dan Banjar. Ada yang mengatakan bahwa kelompok etnik Dayak adalah saudara tua orang Banjar. Kalau bahasa dan Islam dianggap sebagai tanda budaya, maka apa yang ditunjuknya adalah representasi identitas kelompok etnik. Perlu diingat kembali bahwa representasi itu terjadi dari hubungan antara tanda dan penandanya serta ada kontestasi wacana dalam diri identitas itu.

Dengan demikian, kelompok migran yang orang Minang berdasarkan identitas bahasanya adalah mereka yang menggunakan bahasa Padang, kelompok Minang yang orang Medan menggunakan bahasa Batak, migran Bugis menggunakan bahasa Bugis, dan yang orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Pada kenyataannya para migran ini melalui proses belajar menggunakan bahasa Banjar sub-dialek Paringin dalam komunikasi. Dari sudut kebudayaan Banjar kenyataan ini berarti bahwa para migran yang “liyan” (*the other*) berusaha untuk menjadi “aku” (*self*)nya kebudayaan Banjar.

Dari sudut bahasa telah pula terjadi kontestasi dalam menentukan identitas, baik secara vertikal maupun horizontal. Kontestasi vertikal terjadi pada anak-anak migran yang dalam kasus tersebut di atas semua menggunakan bahasa Banjar sub-dialek Paringin. Bahasa ibu yang biasanya adalah bahasa kelompok etnik mulai ditinggalkan, dan di rumah mereka menuturkan bahasa Banjar. Sedangkan kontestasi horizontal lebih tampak pada generasi di atasnya, yang menggunakan bahasa daerah itu di tempat aktivitasnya. Dengan cara ini, tidak hanya anak-anak yang diterima dalam kebudayaan setempat, tetapi juga para orang tua. Dalam ungkapan lain, bahasa Banjar telah menjadi pemenang kontestasi.

Kategori pelaku identitas yang kedua adalah para penduduk “asli” yang orang Banjar dan Dayak. Orang Banjar mempunyai identitas yang jelas, yang seolah-olah tampak baku yaitu bahasa Banjar dan agama Islam. Bagaimanakah halnya dengan orang Dayak yang berbahasa Maanyan meskipun juga menguasai bahasa Banjar, dan beragama asli Kaharingan?

Kalau para migran telah memperlihatkan perpindahan ruang geografi yang jelas, yaitu dari daerah asal mereka masing-masing menuju Kalimantan Selatan (baca:Paringin), maka kelompok etnik Dayak Balangan juga harus keluar kampung kalau mereka memeluk Islam. Perpindahan ruang seperti ini diperlukan dalam memaknai identitas. Mengapa gadis dalam kasus tersebut di atas tidak mengakui bahwa ada darah Dayak dalam dirinya dan cenderung mengadopsi identitas Banjar yang bahasanya pun sangat dipahaminya. Identitas Banjar yang mempunyai konotasi dengan

kemenangan, pedagang yang sukses dan pendidikan yang semua berhubungan dengan dunia “modern” dan keberhasilan. Sebaliknya, di Amuntai saya mendengar *ethnic sleur* tentang perilaku yang menyimpang dari kebiasaan dan norma setempat, orang yang bodoh dan tidak bisa disiplin, disebut “orang Bukit” yaitu tempat tinggal salah satu tribe Dayak. Makna identitas seperti ini yang tampaknya ingin ditinggalkan oleh kelompok etnik Dayak yang beragama Islam³.

7. Penutup

Uraian sebelumnya mengenai Kerangka Pemikiran, dan Operasionalisasi Masalah, Metodologi serta Obyek Penelitian memperlihatkan ada dua konsep yang harus diteliti secara empiris, yaitu *linguistic boundary* dan *ethnic boundary* yaitu kelompok etnik yang tinggal dalam satu wilayah bahasa.

Penelitian ini baru menyelesaikan permasalahan teoretis dalam lingkup *ethnic boundary* saja, dan belum sampai pada persoalan-persoalan yang menyangkut *linguistic boundary*. Dengan demikian pembicaraan mengenai kelompok etnik dan hal-hal yang berhubungan dengan identitas etnik dan sikap kebahasaan, belum diletakkan dalam konteks *linguistic boundary* seperti yang telah direncanakan dalam kerangka pikir, tetapi hanya dalam batasan wilayah administrasi pemerintahan saja.

³ Hal ini berbeda dengan kelompok etnik Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Sejak pertengahan dari masa pemerintahan Orde Baru, mereka justru memunculkan identitas ke-Dayakan mereka antara lain dengan mendirikan Lembaga Adat Dayak.

Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diharapkan bahwa penelitian dapat dilanjutkan pada tahun anggaran mendatang.

KEPUSTAKAAN

Anwar, Khaidir

1986 “Sumbangan Bahasa Melayu Riau terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia”, dalam Budisantoso, dkk (peny). *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*. Pekanbaru: Diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, hal 27-36.

Dasuki, Sholeh.

1999 “Menguak Hakikat Sociolinguistik”, *Haluan Sastra Budaya* NO. 40 tahun XVIII. Solo: Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan dan Universitas Sebelas Maret, hal 31-40.

Gunarwan, Asim.

2000 “Peran Bahasa sebagai Pemersatu Bangsa”, dalam Kaswanti Purwo (ed). *Kajian Serba Linguistik: Untuk Anton Moeliono Pereksa Bahasa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, hal 51-77.

Kaswanti Purwo, Bambang

2002. “Pemakaian Bahasa Daerah dan Masyarakatnya”, *Jurnal ATL* No. 8 Vol. 7, Desember. Jakarta: Diterbitkan oleh Asosiasi Tradisional Lisan, hal 15-25.

Koentjaraningrat

1986 “ Bahasa Melayu, Bahasa Nasional, dan Bahasa Jawa”, dalam Budisantoso, dkk (peny), hal 9-16.

Kridalaksana, Harimurti

2000. "Politik Bahasa dan Politik Kebudayaan", dalam Kaswanti Purwo (ed), hal 82-85.

Masinambow, E.K.M.

1980. "Bahasa-Bahasa di Timor Timur", *Berita Antropologi* Th. XI. No. 36 Januari-Maret. Jakarta: diterbitkan oleh Lembaga Antropologi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, hal 68-81.

Masinambow, E.K.M. dan Haenen, Paul (peny)

2002. *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Steinhauer, Hein

2000. "Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah di Indonesia", dalam Kaswanti Purwo (ed), hal 175- 195.